Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, June-September 2026, pp. 3572-3585
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Optimalisasi Pengelolaan Indikator Kinerja Utama Melalui *Drive Based Information & Governance Integration* (DIGI IKU) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Annisa[1*], Sadar[2]

[1,2]Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jl. RTA Milono, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
annisaspt2022@gmail.com

Abstract

Managing Key Performance Indicators (KPIs) for the East Kotawaringin Regency Government requires data and documents that are accurate, structured, easily accessible, and capable of periodic monitoring. However, management has been hindered by fragmented document storage, difficulties in data retrieval, suboptimal monitoring, and coordination issues among regional agencies—all of which impact the effectiveness of performance evaluations and the fulfillment of SAKIP (Government Agency Performance Accountability System) documentation requirements. DIGI IKU was developed as a digital governance innovation based on Google Drive to store, manage, and share KPI documents in an integrated manner. This study aims to analyze the implementation of DIGI IKU, identify document management challenges, and assess its contribution to monitoring efficiency, coordination, transparency, accountability, and SAKIP compliance. A descriptive qualitative method was employed, utilizing observation, interviews, and document analysis—specifically data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that a folder structure organized by regional agency, document type, indicator, and reporting period accelerates document retrieval and the monitoring of document completeness. Standardizing formats and naming conventions enhances administrative uniformity, while outreach and guidance address limitations in digital literacy. Leveraging Google Drive offers a practical, low-cost, integrated solution, with success contingent upon governance standardization, user discipline, the clear division of authority, and the commitment of regional agencies.
Keywords: Poverty; Economic Growth; Unemployment; Human Development Index; Kampar Regency

Abstrak

Pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan data dan dokumen yang akurat, terstruktur, mudah diakses, dan dapat dipantau berkala. Namun, pengelolaan masih terkendala penyimpanan dokumen yang tersebar, sulitnya pencarian data, monitoring yang belum optimal, serta koordinasi antarperangkat daerah yang memengaruhi efektivitas evaluasi kinerja dan pemenuhan dokumen SAKIP. DIGI IKU dikembangkan sebagai inovasi tata kelola digital berbasis Google Drive untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen IKU secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan DIGI IKU, mengidentifikasi kendala pengelolaan dokumen, serta menilai kontribusinya terhadap efisiensi monitoring, koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan SAKIP. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis berupa reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa struktur folder berdasarkan perangkat daerah, jenis dokumen, indikator, dan periode pelaporan mempercepat pencarian serta pemantauan kelengkapan dokumen. Standardisasi format dan penamaan meningkatkan keseragaman administrasi, sedangkan sosialisasi dan pendampingan mengatasi keterbatasan literasi digital. Pemanfaatan Google Drive menjadi solusi terintegrasi yang praktis dan berbiaya rendah, dengan keberhasilan bergantung pada standardisasi tata kelola, kedisiplinan pengguna, pembagian kewenangan, dan komitmen perangkat daerah.
Kata Kunci: Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Indeks Pembangunan Manusia; Kabupaten Kampar

Copyright (c) 2026 Annisa, Sadar

✉ Corresponding author: Annisa
Email Address: annisaspt2022@gmail.com (Jl. RTA Milono, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)
Received 21 August 2026, Accepted 28 Agustus 2026, Published 05 September 2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan tidak lagi terbatas pada penyediaan layanan publik secara elektronik, tetapi telah berkembang pada pengelolaan data, dokumen, informasi, monitoring, evaluasi serta pengambilan Keputusan berbasis data. Dalam konteks manajemen pemerintahan, transformasi digital menjadi semakin penting karena proses pengambilan Keputusan dan evaluasi kinerja membutuhkan informasi yang cepat, akurat, terdokumentasi dan mudah ditelusuri.

Menurut Rattu et, al (2022:2) optimalisasi pada kinerja seorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya seperti kurangnya partisipasi, kasih sayang dan motivasi untuk mencapai tujuan pemimpin. Hal ini ditentukan oleh meningkatnya absensi, waktu yang tidak produktif serta presentase penyelesaian pekerjaan.

Optimalisasi dalam bahasa inggris, Optimization is a process, method and action to optimizing yaitu menjadi yang terbaik, setinggi-tingginya dll). Istilah optimalisasi sering mengacu pada keadaan ketika semua persyaratan dipenuhi oleh tindakan yang diambil. Bila ditinjau dari sudut pandang perusahaan, optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan guna mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang Winardi, optimalisasimerupakan metrik yang menyebabkan tercapainya tujuan. Saat menetapkan tujuan organisasi, bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas maksimum biasanya yang terbaik.

Optimalisasi adalah proses berjuang untuk kinerja yang lebih optimal guna mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam bentuk uang. Berdasarkan penjelasan tersebut. Jelaslah bahwa optimasi yang berhasil memerlukan pelaksanaan yang hati-hati dan metodis. Ketika merumuskan suatu sistem, efektivitas dan efisiensi dalam menghasilkan hasil yang diinginkan harus selalu diprioritaskan.

Optimalisasi adalah proses untuk menemukan solusi yang terbaik, tidak berarti selalu mencari keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Terdapat tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Siringiringo, 2005).

1. Tujuan

   Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengoptimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harusnya disesuaikan denga napa yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan.

2. Alternatif keputusan

   Alternatif keputusan adalah kegiatan yang diilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh

pengambilan keputusan sekarang. Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita aspirasi dan pencapaian tujuan melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dan ini semua berintikan pada hubungan kemanusiaan. Ada yang berpendapat bahwa keputusan-keputusan berpusat pada pengelolaan. Dalam situasi manajemen tertentu suatu keputusan atau bagian keputusan harus mendahului pelaksanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian hasil bagaimanapun juga akan ditentukan dalam keputusan dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

3. Sumber daya yang dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber day aini terbatas. Keterlibatan inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi. Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi tenaga kerja antara lain dengan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja. Dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, keterampilan pendukung lain, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja, pembangungan pemukiman transmigrasi baru serta pembinaan. Peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja serta pemasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metode peningkatan produktifitas serta pengembangan kader dan tenaga ahli produktifitas.

Menurut Sidiku (Fatmawati, 2019) berhasil atau tidaknya proses optimasi merupakan syarat terpenting keberhasilan proses optimasi, faktor-faktornya adalah:

1. Komunikasi adalah program yang dapat terlaksana dengan baik jika jelas bagi pelaksananya, hal ini menyangkut proses pemberian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang diberikan.
2. Sumber daya (resources) dalam hal ini mencakup empat komponen, yaitu pemenuhan jumlah dan kualitas personel, informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas penanggung jawab. Dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi.
3. Disposisi, merupakan sikap dan komitmen pelaksana program, khususnya pelaksana program. Ukuran kinerja harus menjadi sesuatu yang dihitung dan diukur dan terhadap tingkat kinerja yang dievaluasi atau dilihat, baik selama perencanaan, pelaksanaan dan setelah operasi selesai.

Satu aspek penting dalam manajemen kinerja pemerintah daerah adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam praktiknya, pengelolaan IKU tidak hanya berkaitan dengan penetapan indikator dan target, tetapi juga meliputi pengumpulan data, pengukuran capaian, penyediaan bukti pendukung, monitoring,

verifikasi, evaluasi dan pelaporan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan IKU sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan tata kelola data yang digunakan oleh organisasi.

Pentingnya pengelolaan IKU juga ditegaskan dalam regulasi mengenai IKU. Pemerintah daerah menetapkan IKU sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Pengelolaan IKU pada pemerintah daerah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penetapan indikator dan target kinerja. Pengelolaan tersebut mencakup rangkaian proses yang lebih luas, mulai dari penyusunan indikator, penetapan target, pengumpulan data, penyediaan dokumen pendukung, pengukuran capaian, pemantauan perkembangan kinerja, verifikasi data, evaluasi, sampai dengan penyusunan laporan kinerja. Setiap tahapan membutuhkan dukungan data dan dokumen yang lengkap, akurat, konsisten, mudah ditelusuri, serta tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Apabila pengelolaan data dan dokumen tersebut belum dilakukan secara sistematis, maka proses pengukuran dan evaluasi kienrja dapat mengalami berbagai kendala.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan kinerja pemerintahan merupakan salah satu area yang membutuhkan dukungan transformasi digital. Manajemen kinerja pemerintah pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk mendukung pengambilan Keputusan. Lestari dan Salomo (2022) melalui kajian literatur mengenai implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia, menjelaskan bahwa manajemen kinerja mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan hasil kinerja dan pemanfaatan informasi tersebut dalam pengambilan Keputusan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan IKU adalah tersebarnya data dan dokumen pendukung pada berbagai media penyimpanan. Dokumen dapat tersimpan pada computer atau perangkat kerja masing-masing pegawai, media penyimpanan eksternal, surat elektronik, aplikasi pesan, maupun platform digital yang berbeda. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan ketika dokumen diperlukan kembali untuk proses monitoring, verifikasi, evaluasi, maupun penyusunan laporan. Semakin banyak perangkat daerah dan jenis dokumen yang harus dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem penyimpanaan yang terstruktur dan mudah ditelusuri. Permasalahan lainnya adalah belum seragamnya tata cara pengelolaan dokumen IKU antarperangkat daerah. Perbedaan cara pemberian nama file, struktur folder, jenis dokumen pendukung, periode penyimpanan, serta mekanisme pembaruan data dapat menyebabkan proses konsolidasi menjadi lebih sulit. Kondisi ini juga dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkan oleh pengelola kinerja untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah tersedia. Dalam situasi tertentu, dokumen yang sebenarnya telah tersedia dapat dianggap belum terpenuhi karena sulit ditemukan atau disampaikan melalui media yang berbeda.

Selain persoalan penyimpanan, aspek monitoring dan koordinasi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan IKU. Pengelola kinerja membutuhkan informasi mengenai perkembangan pemenuhan dokumen secara berkala, sementara perangkat daerah bertanggung jawab menyediakan data dan bukti

pendukung sesuai indikator yang telah ditetapkan. Apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual melalui komunikasi secara individual, maka diperlukan waktu dan tenaga yang lebih besar. Permintaan dokumen yang berulang, proses konfirmasi, pemeriksaan kelengkapan, serta penyampaian hasil perbaikan dapat menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien.

Penelitian Lestari dan Salomo (2022) memperkuat persoalan tersebut dengan menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menghadapi tantangan pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Artinya, keberhasilan manajemen kinerja tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyediakan sumber daya, mengelola informasi, mengoordinasikan unit kerja dan membangun mekanisme kerja yang mendukung akuntabilitas.

METODE

Dalam setiap penelitian pada umumnya mempunyai berbagai macam cara tersendiri dalam memilih metode yang akan digunakan dalam penyusunannya. Desain penelitian adalah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam penggunaan metode penyusunan ini diperlukan Teknik pengumpulan data, analisis data serta cara untuk mendapatkan berbagai informasi dan fakta yang terdapat di lapangan. Menurut Simangunsong (2017:83) penelitian bersifat induktif dimana sebuah judul penelitian dan pemerintahan pada semua tugas akhir baik laporan akhir, skripsi, tesis dan disertasi dapat tersusun dengan baik apabila berangkat dari "masalah" dan kemudian disandingkan dengan konsep atau teori yang akan menjadi pisau analisis, sehingga kadang terkesan bahwa judul sebuah penelitian kualitatif pemerintahan masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan kemudian mendudukkannya dengan konsep atau teori yang jelas dan spesifik sebagai pisau analisis. Artinya cari masalahnya terlebih dahulu kemudian sandingkan dengan konsep atau teori yang cocok. Menurut Simangunsong (2016:192) dalam bukunya Metodologi Penelitian pemerintahan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki pandangan bahwa fokus sebuah penelitian kualitatif serta mencari makna (meanings) sehingga harus disadari bahwa makna (meanings) yang dibangun dalam penelitian kualitatif berangkat dari perumusan masalah yang disusun menjadi tema-tema penelitian yang bersifat subyektif dan jamak.

Dalam penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penafsiran data tetapi meliputi analisis dan interprestasi data yang diperoleh nantinya akan ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan sebenarnya dilapangan bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Indikator Kinerja Utama Melalui Drive Based Information % Governance Integration (DIGI IKU) Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, faktor penghambat yang ditemui, maupun solusi yang disarankan. Adapun didalam pengambilan data menggunakan metode triangulasi,

yang merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan teknik pengolahan data kualitatif, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara, dan
3. Dokumentasi

HASIL DAN DISKUSI

Pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu bagian penting dalam. penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja. IKU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran keberhasilan organisasi perangkat daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai ketercapaian sasaran strategis, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan organisasi. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan IKU sangat menentukan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Data IKU berasal dari berbagai perangkat daerah dengan karakteristik, jenis indikator, sumber data, periode pengukuran, dan dokumen pendukung yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap suatu mekanisme pengelolaan informasi yang mampu menyatukan data, dokumen, proses pemantauan, dan koordinasi dalam satu sistem yang mudah diakses.

Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah Drive-Based Information & Governance Integration (DIGI IKU), yaitu pendekatan pengelolaan IKU berbasis penyimpanan digital dan integrasi tata kelola informasi dengan memanfaatkan media cloud storage seperti Google Drive, struktur folder yang terstandar, lembar kerja bersama, serta mekanisme pengendalian dokumen dan informasi. DIGI IKU diarahkan bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan dokumen, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan keteraturan, keterlacakan, kemudahan akses, koordinasi, monitoring, dan pengendalian data IKU.

Pembahasan optimalisasi DIGI IKU dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori optimalisasi Hotniar Siringoringo, yang menempatkan tiga elemen utama sebagai dasar analisis, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Ketiga elemen tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana DIGI IKU mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan IKU di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Optimalisasi Berdasarkan Indikator Tujuan

Menurut Siringoringo tujuan dalam optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi maupun minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila sesuatu yang hendak dicapai berkaitan dengan peningkatan manfaat, penerimaan, kualitas, atau hasil. Sementara itu, minimisasi digunakan apabila optimalisasi diarahkan untuk mengurangi biaya, waktu, jarak, atau hal-hal yang tidak efisien. Dengan demikian,

penentuan tujuan harus secara jelas menentukan apa yang ingin dimaksimalkan dan apa yang ingin diminimalkan.

Dalam konteks pengelolaan IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tujuan optimalisasi melalui DIGI IKU dapat dilihat dari dua arah, yaitu memaksimalkan kualitas pengelolaan informasi kinerja dan meminimalkan berbagai ketidakefisienan dalam proses pengelolaan IKU.

1. Memaksimalkan Kualitas Pengelolaan IKU

   Tujuan utama DIGI IKU adalah meningkatkan kualitas pengelolaan IKU agar data kinerja dapat dikelola secara lebih terstruktur, sistematis, mudah ditelusuri, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebelum adanya mekanisme pengelolaan yang terintegrasi, data dan dokumen IKU berpotensi tersebar pada berbagai perangkat daerah, komputer pribadi, media penyimpanan, maupun komunikasi melalui aplikasi pesan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pencarian data ketika diperlukan untuk monitoring, evaluasi SAKIP, penyusunan LKIP, maupun pemenuhan dokumen pendukung evaluasi. DIGI IKU diarahkan untuk mengubah pola tersebut melalui penyediaan struktur penyimpanan yang lebih sistematis. Setiap perangkat daerah dapat memiliki ruang penyimpanan dan struktur dokumen yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pengelolaan IKU.

   Dengan demikian, tujuan optimalisasi pada aspek ini tidak hanya berupa tersedianya media penyimpanan digital, tetapi juga meningkatnya kualitas tata kelola informasi kinerja.

   Kualitas tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

   a. Kelengkapan data IKU
   b. Keteraturan dokumen pendukung
   c. Kemudahan pencarian informasi
   d. Kecepatan memperoleh data
   e. Keterbaruan informasi
   f. Keterlacakan dokumen
   g. Kemudahan monitoring dan evaluasi, dan
   h. Kemudahan koordinasi antar perangkat daerah

2. Memaksimalkan Transparansi dan Akuntabilitas

   Tujuan lain dari DIGI IKU adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data kinerja. Dalam pengelolaan IKU, data tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap indikator harus memiliki sumber data yang jelas, definisi operasional, target, realisasi, periode pengukuran, penanggung jawab, serta dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Melalui struktur penyimpanan digital yang terorganisasi, dokumen pendukung dapat ditempatkan pada lokasi yang jelas dan dapat ditelusuri oleh pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini membantu mengurangi risiko dokumen hilang, tertukar, atau tidak diketahui keberadaannya ketika diperlukan. Dengan demikian, DIGI IKU

berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas karena setiap data kinerja dapat diarahkan untuk memiliki jejak dokumentasi yang lebih jelas.

3. Meminimalkan Waktu Pencarian Data

   Jika tujuan optimalisasi dilihat dari perspektif minimisasi, salah satu hal yang perlu diminimalkan adalah waktu pencarian dan pengumpulan data IKU. Dalam pengelolaan kinerja pemerintah daerah, kebutuhan data dapat muncul secara periodik maupun mendadak. Data dapat dibutuhkan untuk rapat pimpinan, monitoring capaian, penyusunan laporan, evaluasi SAKIP, evaluasi Reformasi Birokrasi, maupun permintaan data dari instansi pembina. DIGI IKU memungkinkan dokumen disusun berdasarkan struktur yang telah ditetapkan sehingga pencarian tidak perlu dilakukan melalui banyak sumber secara terpisah. Dengan demikian, semakin terstruktur penyimpanan data, semakin kecil waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

4. Meminimalkan Duplikasi Data dan Dokumen

   Pengelolaan data secara terpisah dapat menimbulkan duplikasi dokumen. Dokumen yang sama dapat tersimpan dalam beberapa perangkat dengan versi yang berbeda. DIGI IKU diarahkan untuk mengurangi permasalahan tersebut melalui penyimpanan terpusat dan penggunaan dokumen bersama. Dengan adanya satu sumber informasi yang menjadi rujukan, kemungkinan penggunaan dokumen versi lama dapat diminimalkan. Hal ini penting karena dalam pengelolaan IKU, penggunaan data yang berbeda antara satu unit dengan unit lainnya dapat menghasilkan interpretasi kinerja yang tidak konsisten.

5. Meminimalkan Keterlambatan Pelaporan

   Tujuan berikutnya adalah mengurangi keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung IKU. Pengelolaan berbasis digital memungkinkan perangkat daerah mengunggah dan memperbarui data tanpa harus menunggu proses pengiriman dokumen secara fisik. Dengan demikian, proses koordinasi dapat dilakukan lebih cepat. Optimalisasi pada aspek tujuan dapat dirumuskan sebagai:

   Memaksimalkan kualitas, ketepatan, keteraturan, keterlacakan, dan aksesibilitas data IKU serta meminimalkan waktu, duplikasi, kesalahan administrasi, dan keterlambatan dalam pengelolaan informasi kinerja.

   Dengan demikian, berdasarkan indikator tujuan Siringoringo, DIGI IKU dapat dikatakan relevan karena memiliki tujuan yang jelas, baik dalam bentuk maksimisasi maupun minimisasi.

Optimalisasi Berdasarkan Indikator Alternatif Keputusan

Menurut Siringoringo, alternatif keputusan merupakan pilihan tindakan atau aktivitas yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengambil keputusan menghadapi beberapa pilihan dan harus menentukan alternatif yang paling tepat dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks DIGI IKU, alternatif keputusan muncul dari kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menentukan metode pengelolaan IKU yang efektif, mudah diterapkan, dapat dikembangkan, dan sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia.

1. Alternatif Pengelolaan Secara Konvensional

   Salah satu alternatif adalah mempertahankan pengelolaan IKU secara konvensional melalui dokumen fisik, file komputer masing-masing pegawai, surat-menyurat, dan pengumpulan data secara manual. Alternatif ini relatif mudah dilakukan karena tidak memerlukan perubahan besar terhadap sistem yang telah berjalan. Namun, terdapat kelemahan berupa:

   a. Data tersebar
   b. Proses pencarian relatif lama
   c. Resiko kehilangan dokumen
   d. Duplikasi file
   e. Kesulitan mengetahui versi dokumen terbaru
   f. Proses monitoring kurang real time
   g. Ketergantungan pada personel tertentu

   Dengan mempertimbangkan tujuan optimalisasi, alternatif konvensional memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan IKU yang membutuhkan kecepatan dan keterlacakan.

2. Alternatif Penggunaan Aplikasi Khusus

   Alternatif kedua adalah membangun aplikasi khusus pengelolaan IKU. Namun, pembangunan aplikasi khusus membutuhkan sumber daya yang relatif lebih besar, baik dari aspek anggaran, tenaga ahli, waktu pengembangan, pemeliharaan, keamanan, maupun dukungan teknologi informasi. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, alternatif ini perlu dikaji secara hati-hati.

3. Alternatif DIGI IKU

   Alternatif ketiga adalah menggunakan pendekatan Drive-Based Information & Governance Integration (DIGI IKU). DIGI IKU menawarkan pendekatan yang lebih sederhana karena memanfaatkan teknologi yang relatif mudah tersedia dan dikenal oleh aparatur. Keunggulan utama alternatif ini adalah kemampuannya menggabungkan aspek informasi dan tata kelola tanpa harus langsung membangun sistem aplikasi yang kompleks. Dalam perspektif teori Siringoringo, alternatif DIGI IKU menjadi pilihan yang rasional apabila mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dibandingkan alternatif lainnya.

Optimalisasi Berdasarkan Indikator Sumber Daya yang Dibatasi

Indikator ketiga menurut Siringoringo adalah sumber daya yang dibatasi. Sumber daya merupakan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, tetapi ketersediaannya terbatas. Keterbatasan inilah yang menyebabkan organisasi perlu melakukan optimalisasi.

Dalam implementasi DIGI IKU di Kabupaten Kotawaringin Timur, sumber daya yang terbatas tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, waktu, teknologi, kemampuan digital, data, dan koordinasi.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan DIGI IKU. Teknologi tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh aparatur yang memahami:

   a. Konsep IKU
   b. Pengumpulan Data
   c. Penginputan Data
   d. Pengelolaan Dokumen
   e. Penggunaan Cloud Storage
   f. Keamaan Informasi
   g. Prosedur monitoring dan evaluasi

   Perbedaan kemampuan digital antarpegawai dapat menjadi salah satu kendala. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pembagian tugas, penunjukan pengelola data, pendampingan, pelatihan, serta peningkatan literasi digital.

2. Keterbatasan Anggaran

   Pengembangan sistem informasi secara penuh membutuhkan anggaran untuk pengadaan aplikasi, server, pengembangan, pemeliharaan, keamanan, serta tenaga ahli. DIGI IKU memberikan alternatif yang relatif ekonomis karena memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah tersedia. Namun demikian, efisiensi anggaran bukan berarti tidak diperlukan dukungan anggaran. Anggaran tetap dibutuhkan untuk penguatan kapasitas SDM, peningkatan konektivitas, pengembangan tata kelola, pelatihan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Dengan demikian, optimalisasi anggaran dilakukan dengan prinsip memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang sudah tersedia.

3. Keterbatasan Waktu

   Pengelolaan IKU sering memiliki batas waktu tertentu karena berkaitan dengan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja. Keterlambatan satu perangkat daerah dalam menyampaikan data dapat memengaruhi proses pengumpulan dan konsolidasi data secara keseluruhan. Dengan demikian, waktu yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas administratif dapat dialihkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi kinerja.

Integrasi Ketiga Indikator Optimalisasi Dalam DIGI IKU

Berdasarkan tiga indikator Siringoringo, optimalisasi DIGI IKU dapat digambarkan sebagai hubungan antara tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Tujuan menentukan apa yang ingin dicapai. Alternatif keputusan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Sementara sumber daya yang dibatasi menentukan batas kemampuan organisasi dalam melaksanakan alternatif tersebut. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Siringoringo	Penerapan pada DIGI IKU	Hasil yang Diharapkan
Tujuan	Meningkatkan kualitas pengelolaan IKU dan meminimalkan waktu, duplikasi, serta keterlambatan data	Pengelolaan IKU lebih efektif, efisien, tertib, dan akuntabel
Alternatif Keputusan	Konvensional, aplikasi khusus, atau DIGI IKU	Dipilih alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi
Sumber Daya Yang Dibatasi	SDM, anggaran, waktu, teknologi, data, dan koordinasi	Sumber daya digunakan secara efisien untuk menghasilkan manfaat maksimal

Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi DIGI IKU tidak dapat dilihat hanya dari apakah sistem digital telah digunakan atau belum. Optimalisasi harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan dengan alternatif yang tepat serta menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien.

Pengelolaan Drive Based Information & Governance Integration

Google Drive merupakan media penyimpanan online (Cloud Storage) milik Google yang meluncur pada 24 April 2012. Google Drive merupakan media penyimpanan online (Cloud Storage) milik Google yang menyediakan ruang penyimpanan hingga 15 GB secara gratis. Safitri dan Nasution (2023) mengatakan bahwa Google Drive adalah layanan penyimpanan data yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis informasi, termasuk gambar, video, dokumen, spreadsheet dan presentasi.

Salah satu kelebihan Google Drive yaitu memberikan keamanan pada data yang disimpan dan data yang terhapus dapat digunakan sebagai fitur pembuatan kuis yang bisa di setting pada penggunaan google formulir dengan batasan waktu (Simangunsong, 2021). Harmawanti (2022) juga mengatakan bahwa melalui penggunaan Google Drive kita dapat menghemat keterbatasan alat penyimpanan data seperti flashdisk, hardisk

Google Drive memiliki beberapa kelebihan. Karmila dalam Febrianto (2022) mengungkapkan beberapa kelebihan Google Drive antara lain: a) memungkinkan membuat dokumen, seperti mengolah data, mengolah angka, membuat presentasi, form dan dokumen lainnya. b) berbagi file, Google Drive memudahkan untuk berbagi file dengan orang lain, dan juga memudahkan orang lain untuk melakukan pengeditan terhadap file yang dibuat. c) terintegrasi dengan layanan google lainnya dimana para pengguna layanan google lainnya akan merasakan kemudahan dalam memanagement file dari google drive, karena google drive secara otomatis terintegrasi dengan layanan google lainnya. d) fasilitas pencarian, google drive memberikan layanan pencarian yang lebih baik dan lebih cepat untuk para penggunanya dengan menggunakan kata kunci tertentu. Google Drive juga dapat mengenali gambar atau teks dari dokumen hasil scan . e) menampilkan berbagai file, lebih dari 30 tipe file yang dapat dibuka dan ditampilkan oleh Google Drive, termasuk file video, file image, dan lain-lain tanpa mengharuskan pengguna untuk mengunduh dan menginstal software yang sesuai dengan tipe atau

ekstensi file tersebut. f) menjalankan aplikasi yaitu Google Drive mempunyai kemampuan untuk membuat, menjalankan dan membagi file aplikasi favorit yang dimiliki oleh pengguna.

Di era saat ini, dengan adanya Google Drive sangat besar manfaat yang dapat dirasakan. Seperti yang dijelaskan oleh Reza, dkk (2022) bahwa Google Drive memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita seperti: 1) menerjemahkan file, 2) mengedit file bersama, 3) melakukan back up file, 4) mengkonversi file Pdf menjadi teks, 5) menyimpan link dan history, 6) back up chat WhatsApp, serta 7) melakukan update progress secara berkala pada tugsa atau proyek yang sedang kita kerjakan. Olehnya itu, optimalisasi dalam penggunaannya sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari terutama dalam akses data dimanapun dan kapanpun diperlukan.

Pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai fungsi sebagai mekanisme tujuan strategis organisasi menjadi data yang terukur yang memungkinkan pengukuran capaian secara kuantitatif. Studi Empiris memperlihatkan bahwa sistem pengukuran kinerja yang dilakukan standarisasi IKU untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam menghasilkan output suatu program, mengurangi ketergantungan pada penilaian subyektif dan mengikutsertakan bukti yang terukur jelas. Dengan demikian, IKU diposisikan bukan hanya sekedar daftar indikator administratif tetapi sebagai kerangka kerja yang menyatukan tujuan strategis, indikator output atau outcome dan target kinerja sehingga pengukuran menjadi lebih objektiif dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan manajerial (Murti, 2021).

Implementasi praktis IKU yang efektif menuntut perumusan indikator yang memenuhi kaidah SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu) juga penajaman definisi variabel sehingga pengukuran dapat dilakukan secara konsisten antar satuan kerja.

Dampak dari adanya objektivitas IKU terhadap perilaku organisasi tercermin pada kecenderungan meningkatnya orientasi pada hasil (berorientasi pada hasil) dan praktik akuntabilitas yang lebih ketat. Kajian sistematis terhadap literatur pengukuran kinerja di publik Indonesia melaporkan bahwa organisasi yang menerapkan sektor IKU secara disiplin cenderung memiliki mekanisme pelaporan yang lebih transparan, evaluasi berkala yang berbasis data, serta hubungan yang lebih jelas antara indikator pencapaian dan umpan balik manajerial misalnya perbaikan proses atau alokasi sumber daya. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa ketika indikator disusun untuk mengukur hasil (bukan hanya aktivitas), organisasi mampu menjadi instrumen tujuan untuk menilai kinerja pegawai dan unit kerja dalam konteks pencapaian strategi (Satria, 2025).

Tantangan Dalam Pengelolaan Indikator Kinerja Utama

1. Sinkronisasi data terhambat, kesulitan menyelaraskan data dari berbagai unit kerja yang mengunggah atau memperbarui file secara bersamaan.
2. Kontrol akses dan keamanan, resiko file terhapus, terubah atau disalahgunakan karena batas izin berbagi (sharing permissions) yang kurang ketat.

3. Manajemen versi berkas, munculnya banyak duplikasi file atau versi lama yang masih dipakai karena tidak ada sistem penguncian otomatis.
4. Kurangnya validasi otomatis, Google Drive tidak memiliki sistem validasi langsung untuk memastikan kebenaran format data IKU yang di input oleh anggota tim.
5. Keterbatasan pelacakan audit, sulit melacak riwayat perubahan (version history) secara mendetail jika banyak pengguna mengubah dokumen spreadsheet dalam waktu berdekatan.

Dampak Positif Pengelolaan Indikator Kinerja Utama

1. Aksesibiltas tinggi, dokumen IKU dan laporan capaian dapat diakses kapan saja dan dari mana saja secara real time oleh pihak yang berkepentingan.
2. Kolaborasi tim efektif, anggota tim dapat memperbarui data, memberikan masukan atau memantau progres bersama-sama dalam satu file terpusat.
3. Efisiensi waktu dan biaya, proses pencarian, pengarsipan dan pelaporan dokumen IKU menjadi jauh lebih cepat tanpa membutuhkan ruang penyimpanan fisik yang besar.
4. Transparansi kinerja, pimpinan dapat memantau perkembangan target dan evaluasi IKU secara berkala dengan lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Indikator Kinerja Utama melalui Drive-Based Information & Governance Integration (DIGI IKU) di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan bahwa DIGI IKU merupakan pendekatan yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan informasi kinerja melalui pemanfaatan teknologi digital yang sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses. DIGI IKU tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen, tetapi juga dapat menjadi instrumen pendukung koordinasi, monitoring, pengendalian dokumen, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan IKU.

REFERENSI

Fatmawati, A. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru MI (Skripsi/Tesis). Kudus: IAIN Kudus.

Febrianto, A. (2022). Analisis Pemanfaatan Layanan Cloud Storage Google Drive dalam Manajemen Arsip Digital. Jurnal Manajemen Informasi dan Teknologi Digital.

Harmawanti, N. (2022). Efisiensi Penggunaan Cloud Storage Sebagai Media Penyimpanan Data Kinerja Organisasi. Jurnal Teknologi dan Informasi Publik

Irwani, I., Yuwono, D. T., & Pratama, M. A. (2025). Smart Analytics: Panduan Visual Regresi dan Klasifikasi dengan Orange Data Mining di Era Data Digital.

Lestari, A., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Government Agency di Indonesia: Kajian Manajemen Kinerja dan Kapasitas Organisasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Murti, C. (2021). Standarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Memperkuat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Jurnal Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Publik.

Rattu, J., et al. (2022). Optimalisasi Kinerja Pegawai Ditinjau dari Partisipasi dan Motivasi Kerja Organisasi. Jurnal Manajemen dan Organisasi Publik.

Reza, M., dkk. (2022). Pemanfaatan Fitur Google Drive dalam Pengelolaan File, Backup Data, dan Kolaborasi Tim. Jurnal Aplikasi Teknologi dan Informasi.

Safitri, D., & Nasution, M. (2023). Layanan dan Efektivitas Penyimpanan Data Berbasis Cloud Storage pada Platform Google Drive. Jurnal Komputer dan Sistem Informasi

Satria, B. (2025). Kajian Sistematis Literatur Pengukuran Kinerja Sektor Publik di Indonesia Berbasis Orientasi Hasil. Jurnal Akuntabilitas dan Kinerja Sektor Publik.

Simangunsong, Fernandes, 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif), PT.Alfabeta : Bandung

Simangunsong, Fernandes, 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. PT.Alfabeta : Bandung

Siringoringo, H. (2005). Seri Teknik Riset Operasional Pemrograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suratmoko, B., Yuwono, D. T., & Anzarach, M. (2025). Challenges And Opportunities Of Digital Transformation Policy For Primary Education In Central Kalimantan. In Proceeding Global Conference on Social Science (Vol. 2, No. 1, pp. 130-140).

Widodo, Joko.2010.Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winardi. 2015. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenada Media.

Yuwono, D. T., Hariyanti, A., & Yunanri, W. (2024). Applying clustering and recommendation system for effective supervision in Central Kalimantan Inspectorate. Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (Jinteks), 6(2), 367-374.